

## PRAGMATISME MENUJU KEDAULATAN PETERNAK (Studi Kasus Di Kabupaten Kediri)

Nur solikin, S.Pd.,M.MA  
[gatokoco.80@gmail.com](mailto:gatokoco.80@gmail.com)

Sapta Andaruisworo, S.Pt.,M.MA  
[saptaandaruisworo@gmail.com](mailto:saptaandaruisworo@gmail.com)

Dosen Fakultas Peternakan, Universitas Nusantara PGRI Kediri

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek pragmatis yang merupakan faktor penentu penguatan ekonomi peternak dalam mengembangkan usaha ternaknya sehingga terwujud kedaulatan peternak dimasa yang akan datang. Penelitian dilakukan bulan maret – september 2016 dengan menggunakan studi kasus di Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peternak sapi di Kabupaten Kediri berpendapat bahwa kedaulatan peternak dapat terwujud jika : 1) kelompok ternak/peternak terlibat langsung dalam membuat program pengembangan ternak baik secara teknik beternak yang baik maupun pembuatan bahan pakan ternak sejumlah 80 % total responden, 2) pemerintah memfasilitasi kebutuhan dana berupa kridet murah bagi peternak sejumlah 90 % total responden, 3) keterlibatan pemerintah dalam menata tataniaga bibit (bakalan) dan hasil ternak untuk mengurangi monopoli oleh pedagang sejumlah 76 % responden, dan 4) perlu pengendalian harga bibit (bakalan) dan hasil ternak sehingga pendapatan ekonomi peternak stabil sejumlah 90 % total responden.

Kata kunci : Pragmatisme, Kedaulatan peternak

### PENDAHULUAN

Pragmatisme merupakan aliran yang mengajarkan bahwa yang benar ialah apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaraan aktifitas yang bermanfaat secara praktis. Orang yang menganut cara pandang meyakini bukan kebenaran objektif dari pengetahuan yang penting melainkan bagaimana kegunaan praktis dari pengetahuan kepada individu-individu. Perdagangan global mempunyai konsekwensi luas terhadap perekonomian Indonesia. Selain mencakup aspek ekonomi dan non ekonomi, juga dapat terdampak positif maupun negatif terhadap perdagangan diantara komoditas pertanian Indonesia seperti pangan dan hortikultura, perkebunan, dan juga terhadap komoditas peternakan. Dalam teori ekonomi diungkapkan bahwa perdagangan global secara umum akan menguntungkan bagi negara-negara yang melaksanakannya, walaupun diakui bahwa manfaat yang dapat diterima oleh masing-masing negara tidak sama.

Teori ekonomi menyatakan bahwa rumahtangga sebagai unit konsumsi sehingga rumahtangga akan memaksimalkan kegunaan dan juga sekaligus sebagai unit produksi rumahtangga bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Teori ekonomi tersebut dalam rumahtangga di pedesaan bukanlah dua hal yang terpisah melainkan merupakan satu unit kesatuan dalam ekonomi rumahtangga. Harga faktor produksi dan upah tenaga kerja akan mempengaruhi keuntungan dan pendapatan rumahtangga, yang selanjutnya akan mempengaruhi pola konsumsi rumahtangga. Produksi mempengaruhi keputusan untuk berkonsumsi melalui pengaruh pendapatan total rumahtangga dan pengeluaran rumah tangga. Proses produksi, pendapatan dan konsumsi dalam rumahtangga peternak merupakan satu unit

kesatuan yang saling terkait, sehingga setiap terjadi perubahan dalam kebijakan yang mengatur aktivitas usaha ternak sapi perah akan berpengaruh terhadap produksi, pendapatan, konsumsi dan penggunaan tenaga kerja rumahtangga peternak harus bisa hidup dari hasil produksinya sehingga harus bekerja keras untuk memperoleh tambahan produksi yang diharapkan. Upaya dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak maka diperlukan pendekatan yang memperhatikan pola pengambilan keputusan secara internal dan eksternal. Keterlibatan seorang anggota peternak sapi potong tidak hanya didasarkan pada keputusan pribadi peternak, melainkan secara bersama-sama.

Sasaran pembangunan ekonomi jangka panjang adalah terjadinya keseimbangan antara industri yang kuat dan peternakan yang tangguh. Hal ini mengisyaratkan adanya hubungan saling mendukung antara sektor industri dan sub-sektor peternakan. Di satu pihak, sektor industri harus merupakan pasar yang baik untuk menyerap surplus sub-sektor peternakan dan di lain pihak, sub-sektor peternakan juga harus mampu merupakan pasar yang baik bagi hasil sektor industri. Dengan demikian maka diharapkan tercipta pasar dalam negeri yang kuat sehingga memungkinkan pertumbuhan ekonomi dan penyedia kesempatan kerja yang semakin tinggi, tanpa mengakibatkan sistem perekonomian dunia yang berlaku. Produksi daging sapi nasional terus menurun atau semakin tidak mampu mengimbangi permintaan di dalam negeri yang terus meningkat. Hal tersebut diakibatkan oleh jumlah penduduk yang semakin bertambah. Mengatasi peningkatan permintaan tersebut, impor daging seolah menjadi jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan daging sapi dalam negeri. Kebijakan impor tersebut tentu semakin menguras devisa negara.

Merujuk pada pedoman umum tentang Sentra Peternakan Rakyat (SPR) berangkat dari filosofi bahwa pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang mensejahterakan peternak rakyat hanya dapat diperoleh apabila pemerintah dan para pihak melakukan berbagai upaya yang memperhatikan prinsip satu manajemen, pengorganisasian (konsolidasi) pelaku, dan pemberdayaan peternak dalam rangka terwujudnya populasi ternak berencana. Harapan dari pembangunan peternakan adalah terwujudnya kedaulatan peternak. Berdasar hal tersebut perlu untuk dikaji berbagai praktik aktifitas (pragmatis) yang berpotensi mewujudkan pembangunan sektor peternakan khususnya peternak sapi potong.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada bulan maret sampai september 2016 dengan menggunakan pendekatan studi kasus di Kabupaten Kediri, sampel diambil secara purposive sampling dengan menitik beratkan pada beberapa wilayah. Kecamatan yang terpilih meliputi kecamatan Gurah, Kunjang, Plemahan, Purwoasri, Papar. Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan angket yang diisi oleh responden serta dokumen yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Kediri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Kediri merupakan salah satu kabupaten yang ada di propinsi Jawa timur yang memiliki kontribusi dalam menyediakan kebutuhan daging sapi, sumberdaya alam yang sangat memadai menjadi kekuatan tersendiri bagi kabupaten Kediri dalam meningkatkan populasi ternak sapi. Kabupaten Kediri salah satu daerah di Jawa timur yang memiliki potensi besar untuk dapat dijadikan sebagai lokasi pengembangan usaha peternakan sapi terutama sapi potong, dikarenakan agroklimat, sumberdaya alam dan budaya masyarakatnya mendukung bagi kegiatan peternakan tersebut. Kabupaten Kediri sangat berpotensi sebagai wilayah penghasil Pertanian baik tanaman pangan maupun hortikultura, serta tanaman buah serta peternakan.

Berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010 – 2030 pasal 35 menyatakan bahwa pengembangan sentra peternakan ternak besar sapi potong, berada di Kecamatan Semen, Kras, Kandat, Ngancar, Gurah, Kunjang, Plemahan, Purwoasri, Papar, Pagu, Kayen Kidul, Banyak, Grogol, dan Tarokan. Merupakan salah satu upaya yang baik dalam memulai mengembangkan potensi

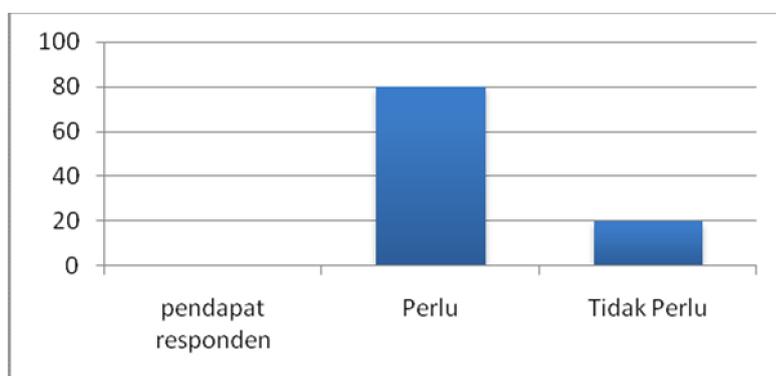
berdasar perwilayahan dan komoditas potensial. Berdasarkan UU RI No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Menurut UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, berkeadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, dan ini merupakan suatu *institutional objective* di setiap daerah Indonesia.

Pemberdayaan masyarakat peternak sapi potong perlu dilakukan dengan serius agar mampu menjawab tantangan di era globalisasi (yaitu menuju usaha agribisnis), membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, para pelaku ekonomi (peternak) untuk saling melengkapi. Melihat fakta yang ada maka muncul pertanyaan sebagai berikut 1) bagaimana keterlibatan kelompok ternak/peternak dalam membuat program pengembangan ternak baik secara teknik beternak yang baik maupun pembuatan bahan pakan ternak, 2) seberapa perlu pemerintah memfasilitasi kebutuhan dana berupa kredit murah bagi peternak, 3) apakah diperlukan keterlibatan pemerintah dalam menata tataniaga bibit (bakalan) dan hasil ternak untuk mengurangi monopoli oleh pedagang dan 4) apakah diperlu pengendalian harga bibit (bakalan) dan hasil ternak sehingga pendapatan ekonomi peternak stabil.

Kelompok peternak/peternak merupakan salah satu kunci utama yang menentukan keberlangsungan dan keberhasilan ternak sapi potong, sebagian besar peternak sapi potong di kabupaten kediri merupakan peternak kecil dengan jumlah penguasaan hewan antara 2-5 ekor, namun jumlahnya tersebar dan masih memosisikan ternak sebagai usaha sampingan. Diantara peternak yang ada sebagian kecil yang sudah berasosiasi dalam satu kelompok dan sebagian masih belum melakukan usaha secara berkelompok (mandiri) dengan beragam alasan. Dalam penelitian ini hanya fokus pada beberapa hal saja yang diteliti :

1. Keterlibatan kelompok ternak/peternak dalam membuat program pengembangan ternak sapi potong.

Partisipasi peternak/kelompok peternak dalam pengembangan peternakan sapi potong sangat menentukan keberhasilan, dikarenakan peternak secara praktis mengetahui ketersediaan kebutuhan pakan, bagaimana mencari bakalan dan iduk yang baik, sayangnya keterlibatan peternak masing belum optimal, hal ini menjadi bahan kajian menurut peternak seberapa perlukan mereka terlibat



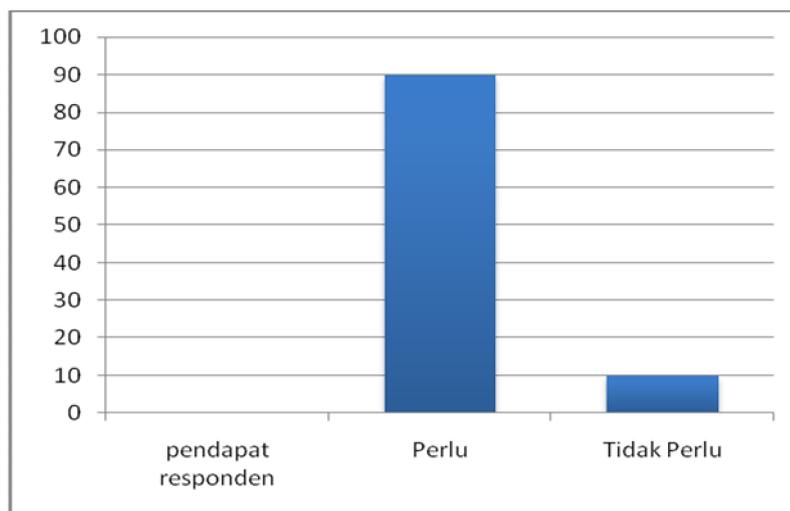
Gambar 1 : Pendapat kelompok/peternak dilibatkan dalam pembuatan program pengembangan sapi

## potong di kediri

Hasil dari 100 responden kelompok/ peternak yang ada di kabupaten kediri sebanyak 80% berpendapat perlu keterlibatan peternak/kelompok peternak dalam pembuatan perencanaan pengembangan ternak sapi potong di kabupaten kediri, sehingga tampak bahwa kebijakan program masih bersifat nasional (top-down) belum dirinci berdasarkan karakteristik wilayah (agroekosistem) yang bersumber dari informasi para pelaku usaha/ peternak, keikutsertaan peternak dalam merencanakan, mengontrol aktifitas pengembangan akan membawa kontribusi dalam menyukseskan program. Pengembangan sumberdaya manusia menjadi bagian penting untuk tercapainya keberhasilan pembangunan itu sendiri. Dalam bidang peternakan urgensi pentingnya sumberdaya peternak yang berkualitas. Menurut yunasaf (2008) Keberdayaan peternak dipersonifikasikan oleh perannya yang ditunjukkan oleh berkembangnya potensi peternak sebagai manajer usahatani, pemelihara ternak, dan individu yang otonom, sehingga menjadi pelaku usahatani yang berkualitas. Keterlibatan dalam membuat perencanaan sumber pakan dan pembuatan pakan yang baik menjadi prioritas.

### 2. Diperlukannya kridet murah bagi peternak

Pengembangan pengusahaan sapi potong di Kabupaten Kediri sebagian besar masih tetap berorientasi pada pola peternakan rakyat atau keluarga. Usaha peternakan sapi potong rakyat memiliki posisi yang lemah dan sangat peka terhadap perubahan. Fakta ini yang menyebabkan sulitnya kridet yang dapat di akses oleh peternak. Kebutuhan akan kridet dari responden dapat dilihat pada gambar 2 sebagai berikut :



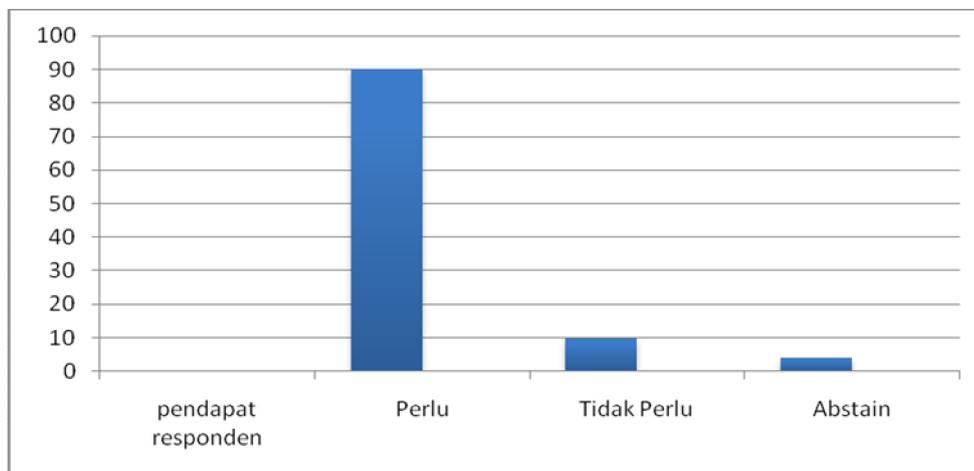
Gambar 2 : Pendapat Responden mengenai kridet murah bagi peternak

Pada gambar 2 menunjukkan bahwa 90 % responden memerlukan kridet yang mudah dan murah bagi kelompok/peternak. Ketersediaan modal merupakan faktor penting dalam usaha peternakan. Dengan ketersediaan dana yang memadai memungkinkan peternak untuk melakukan penundaan penjualan pada saat harga kurang menguntungkan. Jika dalam hal ini sektro perbankan maupun pemerintah dapat menyediakan kridet maka pendapatan peternak akan dapat terlindungi.

### 3. Keterlibatan pemerintah dalam menata tatniaga sapi potong

Tataniaga sapi potong yang dapat terbilang terlalu panjang mengakibatkan lemahnya posisi tawar peternak. Untuk menjual hasil peternakan sapi, peternak menjual ternak kepada pedagang kecil

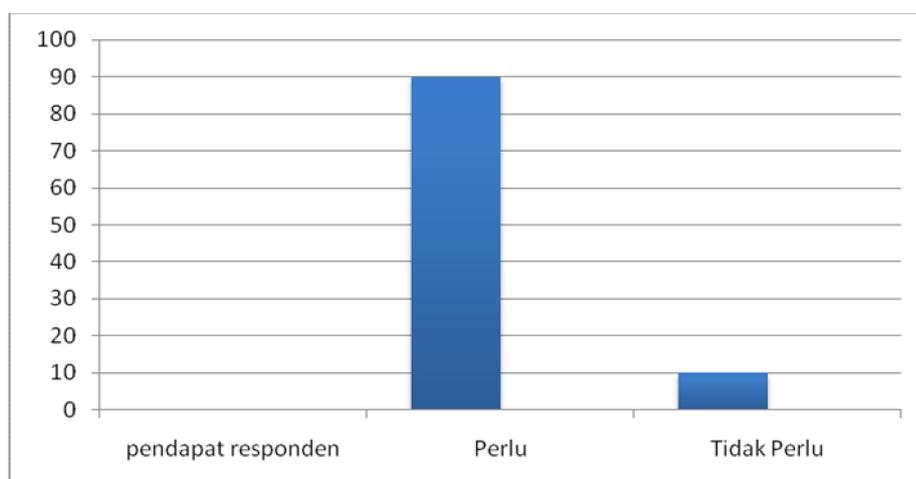
(blantik) dari pedagang kecil sapi dibeli pedagang pengepul selanjutnya dibeli jagal atau pedagang besar. Begitu pula dengan pengadaan bakalan peternak kurang memiliki nilai tawar, disebabkan harga bakalan didasarkan pada performance/tampilan sapi bukan didasarkan pada berat sapi. Pemerintah bisa mengambil peran dalam kontens ini, dengan harapan mampu menjamin ketersediaan bakalan dengan harga yang terukur. Pendapat peternak mengenai hal ini seperti tertera pada gambar 3 sebagai berikut :



Gambar 3 : Perlunya pemerintah mengatur tataniaga sapi potong

#### 4. Pengendalian bakal dan hasil sapi potong oleh pemerintah

Dalam mewujudkan kesejarteraan bersama pemerintah memiliki peranan yang cukup besar. Dalam peternakan sapi potong fungsi pemerintah dalam wilayah ini adalah mengelola semua agribisnis yang ada dalam wilayah itu dengan terpadu. Pendekatan wilayah adalah mengintegrasikan berbagai agribisnis dalam wilayah dan masing-masing agribisnis akan mengembangkan pula ke empat subsistem agribisnis baik horisontal maupun vertikal. Pendekatan ini adalah dalam usaha mengelola input dan output agribisnis keseluruhan, sehingga tercapai peningkatan efisiensi, manfaat dan nilai tambah. Input peternakan berupa bakalan dan pakan sedang output adalah hewan ternak dan produk sampingannya. Peran pemerintah akan bisa mengendalikan para oknum yang kurang bertanggungjawab. Berdasarkan hasil penelitian 90 % responden peternak/kelompok peternak berharap peran pemerintah dalam mengendalikan, sebagaimana tampak pada gambar 4 berikut :



Gambar 4 : Pendapat perlunya pengendalian oleh pemerintah

## SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peternak sapi di Kabupaten Kediri berpendapat bahwa secara pragmatis kedaulatan peternak dapat terwujud jika : 1) kelompok ternak/peternak terlibat langsung dalam membuat program pengembangan ternak baik secara teknik beternak yang baik maupun pembuatan bahan pakan ternak sejumlah 80 % total responden, 2) pemerintah memfasilitasi kebutuhan dana berupa kredit murah bagi peternak sejumlah 90 % total responden, 3) keterlibatan pemerintah dalam menata tataniaga bibit (bakalan) dan hasil ternak untuk mengurangi monopoli oleh pedagang sejumlah 76 % responden, dan 4) perlu pengendalian harga bibit (bakalan) dan hasil ternak sehingga pendapatan ekonomi peternak stabil sejumlah 90 % total responden.

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat statistik Jawa Timur. 2014. Jawa Timur dalam Angka 2014. Surabaya: BPS Jawa Timur.

Badan Pusat statistik Jawa Timur. Jawa Timur dalam Angka 2015. Surabaya: BPS Jawa Timur.  
Online : [www.bps.jatim.go.id](http://www.bps.jatim.go.id)

---

\_\_\_\_\_ 2010. Strategi dan Kebijakan dalam Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi 2014 (Suatu Penelahaan Konkrit). Jakarta: BAPPENAS

Muladno. 2015. Kepala Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Peternak Berdaulat Melalui Kegiatan SPR (Sentra Peternakan Rakyat).

Nawawi, H. 2003. Metodologi Penelitian Bidang Sosial, Cetakan Kesepuluh. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 . "Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010 – 2030". Kediri

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Yunasaf, U. 2008. Dinamika Kelompok Peternak Sapi Perah dan Keberdayaan Anggotanya di Kabupaten Bandung. Disertasi, Institut Pertanian Bogor. Bogor.